

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dapat mengembangkan dirinya serta mengasah kemampuannya dalam berpikir guna membantu dirinya untuk mengambil tindakan atau keputusan yang terbaik untuk dirinya dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal untuk berpikir, membedakan baik dan buruk, serta berada di dalam satu lingkungan yang dinamakan masyarakat untuk menjalani kehidupannya selama di dunia dan menunjukkan akan keberadaannya (Khasinah, 2013, hlm. 299-312). Manusia pada kodratnya adalah makhluk berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, baik dengan sesamanya, Tuhannya, atau lingkungannya. Dewey (dalam Akbar, 2015, hlm. 236) menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional atau makhluk berpikir.

Manusia merupakan makhluk berpikir, makhluk yang bebentuk, serta makhluk yang dapat dididik. Ketiga ciri khas tersebut menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, hal tersebut menempatkan manusia menjadi pribadi yang utuh berdasar pada kaitannya dengan kepentingan perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afektif (Akbar, 2015, hlm. 223). Berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang dapat dididik (*homo education*), maka dengan itu manusia tentunya dapat dididik dan mendidik diri untuk dapat menjadi manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dalam proses pendidikan terjadi suatu pola interaksi antara siswa dan guru untuk mendapatkan dan mentransfer kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Proses yang dimaksud dinamakan proses belajar mengajar.

Tujuan Pendidikan ditinjau dari aspek sosiologis dan psikologis yaitu menjadikan siswa menjadi bagian dari masyarakat yang demokratis sesuai dengan kebudayaan bangsa dan negaranya, mempunyai keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan bangsa, serta menyiapkan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa (Akbar, 2015, hlm. 237). Berdasarkan pendapat yang telah

disampaikan menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa saja, melainkan pendidikan juga terarah pada pengembangan kepribadian siswa sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat, dan sebagai warga Negara Indonesia.

Berbicara mengenai Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Dalam Negeri (dalam Yunani, 2016, hlm. 126) mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 17.508 pulau. Dengan begitu banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia, maka dari itu Indonesia juga akan memiliki beraneka ragam kebudayaan dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Perbedaan akan hadir di tengah beragamnya budaya, etnis, agama, dan latar belakang setiap warga negara. Perbedaan akan menciptakan keanekaragaman, namun disamping itu perbedaan juga dapat menjadi senjata yang akan mengancam keutuhan bangsa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang tergolong ke dalam negara multietnis dan multikultural, sejak pertama berdiri mempunyai berbagai masalah legistimasi kultural seperti; kesenjangan, ketidakadilan, kurangnya pemerataan pembangunan, serta tirani minoritas yang terjadi di berbagai wilayah tanah air pada kenyataannya telah memicu berbagai konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia (Brata, 2016, hlm. 12). Sejalan Dengan pendapat yang telah disampaikan tergambar jelas bahwa dengan beragamnya kebudayaan yang dimiliki Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam konflik yang timbul akibat adanya perbedaan. Sepanjang tahun 2019 menurut Kris (2019) terdapat enam kasus rasis, hoaks, dan propokasi yang terjadi di negeri ini.

Perbedaan merupakan bawaan dari setiap individu, namun meskipun demikian kodrat manusia selaku individu dan makhluk sosial harus berjalan seimbang dan harmonis (Sundawa, 2017, hlm. 202). Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain harus dapat mengesampingkan perbedaan. Perbedaan dapat timbul karena adanya ketidaksamaan antara individu satu dengan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan dapat memicu terjadinya konflik tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan. KPAI (dalam Nurita, 2018) menyatakan bahwa selama kurun waktu per 30 Mei 2018 terdapat 161 kasus dalam dunia pendidikan diantaranya; terdapat 31 kasus anak korban tawuran atau

dalam persentase sebesar 19,3%, 36 kasus anak korban kekerasan dan bullying atau 22,4%, 41 kasus anak pelaku kekerasan dan bullying atau 25,5%, serta 30 kasus anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) atau 18,7% kemungkinan fakta di lapangan lebih banyak dari data yang tertera.

Sejalan dengan ruang lingkup manusia sebagai warga negara mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) wajib dipelajari diberbagai tingkatan instansi pendidikan. Secara harfiah Cogan (dalam Wilodati, dkk, 2016, hlm. 2) mengartikan PPKn atau *Civic Education* sebagai “*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adults lives*”. Menurut pernyataan di atas menyatakan bahwa PPKn sangat memegang peran penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk dapat berperan aktif di dalam lingkungan masyarakat tempat siswa berasal, selain itu PPKn juga dapat menumbuhkan moral dan karakter siswa yang dapat menjadikan siswa menjadi warga negara yang sesuai dengan harapan Pancasila dan UUD 1945.

Mata pelajaran PPKn pun sangat penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara serta membantu menumbuhkan karakter warga negara. Karakter warga negara yang diharapkan menurut Sapriya (2009, hlm. 153) yaitu warga negara yang mampu melihat dan mendekati masalah sebagai masyarakat global, memiliki kemampuan bekerja dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajibannya dalam lingkungan, kemampuan untuk memahami dan menerima serta toleran terhadap keberagaman budaya, serta kapasitas untuk berpikir sistematis dan kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan di tengah banyaknya permasalahan yang dihadapi Indonesia seperti rasisme, hoaks, dan ujaran kebencian yang tidak lama ini sering muncul. Melihat dengan begitu banyaknya permasalahan yang terjadi maka kembali pada fitrah dan kodrat manusia sebagai makhluk berpikir.

Berpikir kritis merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memikirkan ulang setiap hal sebelum pengambilan keputusan, pemikiran yang matang terhadap suatu isu atau masalah yang sedang diperbincangkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ennis (dalam Amri, 2010, hlm. 62) berpikir kritis

merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membuat keputusan yang masuk akal mengenai apa yang dipercayai dan apa yang dikerjakan. Kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting untuk dimiliki terlebih dengan latar belakang Indonesia yang termasuk ke dalam negara multikultural. Pada kenyataan di lapangan saat peneliti melakukan observasi terdapat delapan orang bertengkar di dalam kelas karena perbedaan pendapat dengan temannya saat mengerjakan tugas kelompok dan terdapat dua orang bermusuhan karena saling ejek.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di salah satu SD Negeri di Kota Bandung. Terdapat empat orang siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah pembelajaran tematik yang salah satunya memuat mata pelajaran PPKn dengan materi persatuan dan kesatuan sedangkan 24 siswa lainnya belum dapat memahami secara mendalam makna dari permasalahan yang diangkat, kemudian berdasarkan literatur kemampuan berpikir kritis siswa terutama pada mata pelajaran PPKn masih sangat rendah. Terdapat empat siswa dari sekitar 31 orang siswa yang sudah memenuhi kriteria KKM dan 27 siswa masih belum tuntas (Tri, 2017, hlm. 96).

Berdasarkan observasi dan literatur kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran PPKn masih sangat rendah, salah satunya terjadi karena pembelajaran yang dilakukan masih dilakukan dengan metode konvensional. Pembelajaran menurut Yunus (dalam Nurdyansyah dan Fahyuni, 2016, hlm. 1-2) dipandang dalam sudut kognitif merupakan suatu proses yang dibangun oleh guru untuk dapat mendorong siswa mengembangkan kreativitas berpikir sehingga siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Pendekatan konvensional menurut Sukandi (dalam Shoimin, 2014, hlm. 32) dalam pendekatan konvensional guru lebih banyak mengajar konsep bukan kompetensi yang bertujuan agar siswa dapat mengetahui sesuatu, akhirnya kegiatan siswa lebih banyak mendengarkan selama proses pembelajaran. Pembelajaran konvensional akan membuat siswa menerima materi secara mentah tanpa adanya proses yang bermakna, hal tersebut dapat menjadikan siswa tidak dapat memaknai pembelajaran sehingga pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa akan terhambat.

Memaknai betapa pentingnya siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, maka dari itu pengkondisian pembelajaran haruslah dapat menunjang siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dibutuhkan suatu rancangan pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks penelitian ini rancangan yang dibuat yaitu dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP bertujuan untuk mengarahkan pembelajaran menjadi efektif, aplikatif, dan bermakna. Menurut Degeng (2013, hlm. 36) rancangan pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar menjadi lebih efektif, dilakukan dengan cara merancang pembelajaran. Dari pernyataan di atas jelas tujuan dibuatnya rancangan pembelajaran yaitu untuk mencapai satu kompetensi yang telah ditetapkan, maka dari itu pada rancangan pembelajaran ini haruslah mengarah pada penyajian pembelajaran yang dapat menunjang kemampuan berpikir kritis khususnya pada mata pelajaran PPKn.

Saat ini sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Menurut Amri (dalam Ariyanto, 2018, hlm. 106) kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum terintegrasi yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran. KD dari semua mata pelajaran kecuali agama dan matematika merupakan ruang lingkup tematik integratif meliputi pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Penjasorkes serta Seni Budaya dan Prakarya. Namun, pada konteks penelitian ini peneliti lebih menekankan pada mata pelajaran PPKn sejalan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya di atas.

Atas dasar pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi setiap warga negara dan kurang efektifnya pembelajaran konvensional dalam mengembangkannya, maka diperlukan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan bantuan model pembelajaran yang dapat mendukung untuk dapat mengoptimalkan, meningkatkan, dan menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model *Problem Based Learning* (PBL) dapat menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan pembelajaran yang memicu kegiatan berpikir kritis siswa. Model PBL merupakan model dalam pembelajaran yang mengangkat permasalahan autentik dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Piaget (dalam Makmun, 2007, hlm. 103) menyatakan

bahwa terdapat beberapa fase yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak berdasarkan usia, anak 7-11 tahun atau berada pada fase operasional konkret. Anak dapat berpikir dengan contoh nyata.

Model *Problem Based Learning* yang menggunakan permasalahan di lingkungan siswa akan memudahkan proses pembelajaran. Pemberian contoh permasalahan yang berkaitan dengan siswa akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bersifat terbuka tentunya saling bertukar pikiran dengan teman lainnya. Selanjutnya menurut Mustadji (dalam Nurdiansyah dan Fahyuni, 2016, hlm. 82) model *Problem Based Learning* merupakan pembelajaran yang memfokuskan pengangkatan suatu masalah sebagai tema atau fokus utama dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membuat RPP dengan menggunakan model *Problem Based Learning* sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah rancangan pembelajaran berbasis model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn?”. Adapun rumusan masalah khusus dalam konteks penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimanakah rancangan kegiatan pendahuluan dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn?
- 1.1.2 Bagaimanakah rancangan kegiatan inti dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn?
- 1.1.3 Bagaimanakah rancangan kegiatan penutup dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui rancangan kegiatan pendahuluan dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn.
- 1.3.2 Mengetahui rancangan kegiatan inti dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn.
- 1.3.3 Mengetahui rancangan kegiatan penutup dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKn.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagi siswa, siswa akan memperoleh pengalaman belajar dengan menggunakan model *Problem Based Learning* serta mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis khususnya pada mata pelajaran PPKn.
- 1.4.2 Bagi guru, memberikan pengalaman dalam membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan model *Problem Based Learning* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada mata pelajaran PPKn.
- 1.4.3 Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai referensi untuk dapat menghidupkan pembelajaran dalam memunculkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada mata pelajaran PPKn.
- 1.4.4 Bagi peneliti, menambah wawasan dalam dunia pendidikan dan sebagai evaluasi kedepannya jika masih terdapat kekurangan dalam pembuatan rencana pembelajaran dengan menggunakan model *Problem Based Learning* sebagai sarana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada mata pelajaran PPKn.